

ONOMI  
ANGUNAN

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDRALAYA**

**SKRIPSI**

**ELASTISITAS PAJAK DAERAH  
DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH  
KOTA PALEMBANG**



**Oleh**

**BAMBANG SISWANTO  
01003120046**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi  
2006**

7

S  
392.44 07  
Lis  
e  
2006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDRALAYA**



**SKRIPSI**

**ELASTISITAS PAJAK DAERAH  
DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH  
KOTA PALEMBANG**



R.15744  
15506

Oleh

**BAMBANG SISWANTO**

**01003120046**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat**

**Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**2006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**SKRIPSI**

**ELASTISITAS PAJAK DAERAH  
DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH  
KOTA PALEMBANG**

**Diajukan Oleh :**

**BAMBANG SISWANTO  
01003120046**

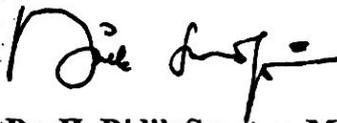
**Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Komprehensif**

**Pada tanggal 14 November 2006**

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

**Panitia Ujian Komprehensif**

**Ketua**



**Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP : 131673869**

**Anggota**



**Drs. Suhel, M.Si  
NIP : 131993979**

**Anggota**



**Dra. Hj. Sa'adah Yuliana, M.Si  
NIP : 131885904**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**



**Drs. Suhel, M.Si  
NIP : 131993979**

*Motto :*

*" Sesungguhnya semua perintah apabila Allah SWT menghendaki segala sesuatunya, Allah SWT hanya berkata : Jadilah, maka Jadilah "*

*(QS. Yasin : 82)*

*" Aku Selalu Siap Untuk Belajar, Tapi Aku tidak selalu Suka Untuk Diajari "*

*(Winston Churchill)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- Kedua Orang Tuaku Tercinta*
- Saudara-saudaraku Tersayang*
- Kakek & Nenekku (alm)*
- Ijwanu Tersayang*
- Sahabat-sahabatku*
- Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melihat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Dalam kehidupan bernegara yang layak, pajak merupakan sumber pendapatan yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta. Pajak daerah disamping berperan sebagai sumber pendapatan yang utama juga berperan sebagai alat pengatur. Oleh karena itu perlu dipahami bagaimana penerimaan pajak daerah dikumpulkan dan apa dampaknya terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan. Pada umumnya setiap kegiatan termasuk pemungutan pajak daerah, dapat dibagi atau diukur menurut dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitasnya. Hal inilah yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul "Elastisitas Pajak Daerah Dalam Menunjang Otonomi Daerah Kota Palembang". Selain itu, penulis juga mencoba melihat tingkat efisiensi dan efektivitas pajak daerah guna mengetahui kemampuan dan kinerja aparat pemerintah dalam pemungutan pajak daerah Kota Palembang.

Penulis sadar bahwa hasil dari penelitian ini tidak dapat dikatakan sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan atau kelemahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun.

Demikian semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh pembaca. Amin.

Inderalaya, Oktober 2006

Bambang Siswanto

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., karena atas rahmat dan Hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Elastisitas Pajak Daerah Dalam Menunjang Otonomi Daerah Kota Palembang” dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Prof . Dr. Ir. Zainal Ridho Djafar, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Syamsurijal Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Suhel, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya, yang senantiasa memberikan dorongan untuk segera meraih gelar sarjana.
4. Dr. H. Didik Susetyo, M. Si, selaku Pembimbing Skripsi I, yang telah bersabar membimbing dan mengarahkan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Drs. M. Umar Nuh selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan nasehat dan masukan dalam proses penulisan skripsi dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini dengan baik.

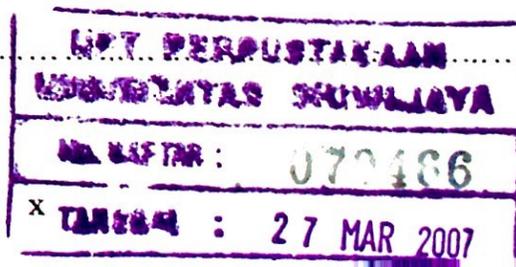
6. Dra. Hj. Sa'adah Yuliana M, Si. Sebagai dosen tamu penguji komprehensif.
7. Seluruh Bapak / Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, tanpa kalian penulis akan tetap menjadi manusia bodoh.
8. Karyawan/ti Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta nasehat yang membuat penulis dapat bertahan dan tidak mudah menyerah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudaraku tercinta (uci, tatok, dan iwan) yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Soulmateku Yoanita Mustika Sari yang termanis, tercantik, baik hati, penyabar, penyayang .....Thanks ye ma,moga qt cepat dipersatukan Amin.
12. Staf pegawai DISPENDA Kota Palembang dan BPS Kota Palembang yang telah memberikan bantuan data.
13. Seluruh teman-temanku Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2000, Senior EP dan adik-adikku EP yang bersedia berbagi suka dan duka dalam proses perkuliahan.
14. Rekan-rekan seperjuangan, Ady pengembara cinta, Tedy, Aan, Agus jolor, hose, ijal, norman, manto, paian, kempeng, labet yang telah memberikan kehidupan aneh dalam EP, tanpa kita semua apalah artinya EP.

15. Sahabat karibku, Wak Idin, Doank, Badak, Taboy, Gedek, Bistek, Jigong, Olga, Koko, Dedet.....tanpa kalian, perumahan rakyat akan hampa. Remember don'try this at home !!!

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu selama perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas budi baik kalian semua dan menjadi berkah kepada kita semua, Amin.

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Persetujuan Skripsi .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Motto dan Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Ucapan Terima Kasih .....	vii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar .....	xv
Abstraksi .....	xvi
Abstract .....	xvii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Landasan Teori .....	6
1.6. Penelitian Terdahulu .....	19
1.7. Hipotesis .....	20



1.8. Metodologi Penelitian .....	21
1.8.1. Ruang Lingkup Penelitian .....	21
1.8.2. Metode Pengumpulan Data .....	21
1.8.3. Teknik Analisis .....	21
1.9. Batasan Variabel .....	27
<b>BAB II</b>	
<b>GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b>	
2.1. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah .....	29
2.2. Topografi dan Iklim .....	29
2.3. Keadaan Wilayah .....	30
2.4. Ketenaga-kerjaan .....	32
2.5. Potensi Wilayah .....	33
2.6. Jenis-jenis Pajak Daerah .....	33
2.7. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang .....	39
2.7.1. Laju Inflasi Sektoral .....	43
2.8. Pendapatan Per Kapita Penduduk Kota Palembang .....	44
2.9. Deskripsi Variabel Yang Diteliti .....	45
2.9.1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah .....	45
2.9.2. Pajak Daerah .....	46
2.9.3. Tinjauan PDRB Kota Palembang .....	49

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis data .....	54
3.1.1. Pajak Daerah .....	54
3.2. Elastisitas Pajak Daerah Terhadap Perekonomian Kota Palembang .....	56
3.2.1. Hasil Estimasi .....	56
3.2.2. Pengujian Statistik .....	57
3.2.3. Pembahasan Elastisitas .....	58
3.3. Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pajak Daerah .....	63
3.3.1. Tingkat Efisiensi .....	63
3.3.2. Tingkat Efektifitas .....	65

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan .....	69
4.2. Saran .....	69

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ukuran Tingkat Efisiensi .....	25
Tabel 1.2	Ukuran Tingkat Efektifitas .....	26
Tabel 2.1	Banyaknya Kelurahan, Desa Per Kecamatan Kota Palembang Tahun 2004 .....	31
Tabel 2.2	Jumlah Pencari Kerja di Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2004 .....	32
Tabel 2.3	Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar di Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1995 - 2003 .....	33
Tabel 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 1995 - 2004 .....	41
Tabel 2.5	Laju Inflasi Sektoral Kota Palembang Tahun 1995 - 2004 .....	43
Tabel 2.6	Perkembangan Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Palembang ....	45
Tabel 2.7	Perkembangan PAD Kota Palembang Tahun 1999 - 2005 .....	46
Tabel 2.8	Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Menurut Jenisnya di Kota Palembang Tahun 2002 - 2004 .....	47
Tabel 2.9	Perkembangan Target Pajak Daerah Menurut Jenisnya di Kota Palembang Tahun 2002 - 2004 .....	48

Tabel 2.10	PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001 - 2004 .....	50
Tabel 2.11	PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001 - 2004 .....	51
Tabel 2.12	Realisasi Penerimaan Daerah Otonom Kota Palembang Tahun 2004 .....	52
Tabel 3.1	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 1995 - 2004 .....	55
Tabel 3.2	Ukuran Tingkat Efisiensi .....	63
Tabel 3.3	Tingkat Efisiensi Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 1995 - 2004 .....	64
Tabel 3.4	Ukuran Tingkat Efektifitas .....	66
Tabel 3.5	Tingkat Efektifitas Pajak Daerah Kota Palembang .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar Uji t-Tabel .....	23
Gambar Uji F .....	24

## ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “Elastisitas Pajak Daerah Dalam Menunjang Otonomi Daerah Kota Palembang”.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui besarnya elastisitas pajak daerah serta tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa migas atas dasar harga berlaku sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan pajak daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan dan Kota Palembang, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang, Pemerintah Kota Palembang, dan buku-buku. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear sederhana.

Hasil regresi menunjukkan koefisien beta sebesar 1,047 % menunjukkan bahwa pajak daerah Kota Palembang bersifat elastis terhadap perkembangan ekonomi. Pajak daerah Kota Palembang juga bekerja dengan efisien dan efektif.

## ABSTRACT

The title of this research is “The Elasticity of The District Tax to support District Otonomic In Palembang City”.

This research purpose is to know the elasticity of the district tax with the efficiency and effectively. The analyzed variables are growth of Gross Domestic Product (GDP) without gasoline to happen calculated as economic growth indicator and the district tax. The used data type is secondary which source from Badan Pusat Statistik (BPS) of South Sumatera and Palembang, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Palembang, Palembang City Government, and the books. This research used simple regression linear method of analyzing.

The result of regresi show beta coefficient equal to 1,047 % indicating that the district tax of Palembang have the character of elastic to economic growth. The district tax of Palembang City also work efficiently and is effective.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sejak diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dan bisa membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya sendiri. Berhubung biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh daerah melalui APBD maka penyerahan kewenangan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah tentunya akan diikuti dengan penyerahan sumber penerimaan dan pengelolaannya kepada daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya.

Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut merupakan landasan bagi pemerintah kabupaten/kota dan propinsi untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk merancang berbagai program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Untuk mendukung keuangan daerah yang berhasil, berbagai sumber pendapatan daerah perlu diadakan penilaian agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Kriteria untuk menilai pendapatan daerah (Dedy, 2000 : 109 - 110) tersebut adalah :

#### 1. Kriteria Hasil

Penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah harus menghasilkan yang cukup, dalam arti cukup memadai dibandingkan dengan pembiayaan layanan yang dihasilkan, serta sebaiknya berkembang cukup stabil dan mudah diperkirakan besarnya dikemudian hari. Stabilitas penerimaan daerah dapat diukur dari rata-rata penyimpangan realisasi penerimaan dengan trend penerimaannya. Semakin kecil rata-rata penyimpangan tersebut maka semakin stabil penerimaannya dan sebaliknya semakin besar rata-rata penyimpangannya maka semakin tidak stabil penerimaannya. Selain mesti stabil, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga sebaiknya cukup elastis terhadap dasar pengenaannya, hal ini disebabkan disatu pihak dasar pengenaan penerimaan umumnya selalu berkembang sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan jumlah penduduk, dipihak lain pertumbuhan ekonomi serta jumlah penduduk tersebut mendorong adanya tuntutan peningkatan pelayanan dari pemerintah, sehingga dengan demikian agar kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi tuntutan pelayanan dari masyarakat tersebut tidak terjadi penurunan maka penerimaan daerah juga harus berkembang sejalan dengan perkembangan dasar pengenaannya.

## 2. Kriteria Keadilan

Sumber penerimaan harus jelas dasar penetapannya serta kewajiban membayar serta tidak sewenang-wenang. Dilihat dari individu pembayar pajak/retribusi seyogyanya asas keadilan memenuhi kriteria keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal artinya bahwa beban pajak yang dipikul adalah sama diantara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Sedangkan keadilan vertikal artinya bahwa kelompok yang lebih mampu ekonominya harus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang kurang mampu.

## 3. Kriteria Efisiensi Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah (khususnya pajak dan retribusi ) hendaknya mendorong atau setidak-tidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung serta memperkecil beban lebih pajak.

## 4. Kriteria Kemampuan Melaksanakan

Suatu pungutan Pendapatan Asli Daerah ( pajak dan retribusi daerah ) haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

#### 5. Kriteria Kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah.

Kriteria ini menekankan mengenai kejelasan hubungan antara daerah /wilayah tempat pajak/retribusi tersebut dipungut dengan pelayan yang diberikan, ini berarti haruslah jelas kepada daerah dimana suatu pajak/retribusi harus dibayarkan.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir semua daerah realisasi pendapatan asli daerahnya relatif kecil. Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan lain yang diatur oleh peraturan per- Undang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah selalu tergantung kepada pemerintah pusat sehingga kemampuan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya pendapatan asli daerah dari suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah tersebut memang miskin tetapi karena pemerintah daerah tidak mampu meningkatkan dan menggali penerimaan dari potensi-potensi yang ada di daerahnya.

Sejalan dengan itu maka Pemerintah Kota Palembang dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan di daerah ini guna menunjang tercapainya tujuan dan kesejahteraan masyarakat kota Palembang. Mengingat sumber pembiayaan tidak semuanya dapat diberikan pemerintah pusat, maka Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menggali sumber-sumber penerimaan yang ada di daerah ini.

Pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang ada di kota Palembang serta mempunyai andil yang cukup besar sebagai sumber penerimaan

daerah dalam pelaksanaan otonomi saat ini. Hanya saja sering ditemui kendala yang ada di lapangan yang menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah di sektor ini kurang optimal atau tidak mencapai target.

Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan diatas, maka skripsi ini diberi judul **“ELASTISITAS PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH KOTA PALEMBANG”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi titik tolak didalam penulisan

skripsi ini. Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berapa besar elastisitas pajak daerah Kota Palembang ?
2. Berapa tingkat efisiensi dan efektivitas pajak daerah Kota Palembang ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui besarnya elastisitas pajak daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pajak daerah Kota Palembang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah kota Palembang dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijaksanaan mengenai keuangan daerah.
2. Bagi mahasiswa diharapkan dapat berguna sebagai acuan dalam penyusunan laporan atau skripsi.

#### **1.5 Landasan Teori**

Menurut Mamesah (1995: 93) Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin terasa kontribusinya yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dimasa yang akan datang. Dengan demikian lebih mendorong pemerintah daerah untuk lebih berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik dari sektor pajak, retribusi, penerimaan daerah lainnya.

Menurut Suparmoko (2002: 85) di samping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Di beberapa daerah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dapat lebih besar daripada pendapatan dari pajak daerah.

Seperti dinyatakan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan

pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud Pajak Daerah menurut Suparmoko (2002: 85) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan Retribusi Daerah menurut Suparmoko (2002: 85) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Adam Smith bahwa dalam sistem perpajakan pada umumnya ada empat aturan (*Smith's canons*) (Sutrisno PH, 1986 : 5-13), yaitu :

1. Asas Keadilan (equality)

Artinya beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dasar didalam distribusi dari setiap tingkatan, penghasilan harus dijadikan dasar dalam memungut pajak, tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

2. Asas Kepastian (certainty)

Pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

3. Asas Kesenangan (convenience)

Pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak, sehingga wajib pajak akan

dengan senang hati melakukan pembayaran kepada pemerintah.

#### 4. Asas Penghematan (economy)

Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

Musgrave (Sutrisno PH, 1986 : 5-13) mengemukakan ada enam persyaratan bagi suatu struktur perpajakan yang baik. Adapun persyaratan tersebut meliputi :

1. Distribusi beban pajak adil (equitable). Dalam distribusi, beban pajak hendaknya bersifat faire share untuk setiap orang. Artinya sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.
2. Pengenaan pajak hendaknya yang sedikit mungkin mencapai keputusan ekonomis seseorang dalam menuju pada pasar yang efisien. Campur tangan yang merupakan excess burden hendaknya diusahakan seminimal mungkin dalam mencampuri keadilan.
3. Apabila kebijakan perpajakan digunakan untuk mencapai tujuan lain, hendaknya diusahakan seminimal mungkin dalam mencapai keadilan.
4. Struktur perpajakan hendaknya disusun dan diusahakan agar administrasi bersifat objektif dan tidak acak-acakan sehingga mudah untuk dimengerti oleh setiap pembayar pajak.
5. Struktur perpajakan hendaknya disusun dan diusahakan sedemikian rupa sehingga kebijaksanaan fiskal yang digunakan untuk mencapai tujuan stabilisasi dan tujuan pertumbuhan dapat dengan mudah dilaksanakan.

6. Sesuai dengan tujuan. Tujuan lainnya ongkos administrasi penetapan pajak hendaknya diusahakan serendah-rendahnya. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan / penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari penerimaan pajak ke kas daerah.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan dari pajak, maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk membantu serta berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, karena kegiatan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Bantuan dan partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Kemampuan suatu negara untuk memungut pajak akan ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut menurut Radius Prawiro ( Prawiro R, 1988 : 311) adalah :

1. Basis Pajak: meliputi wajib pajak dan objek
2. Administrasi Pajak : meliputi sistem dan prosedur perpajakan
3. Aparat Pajak terutama menyangkut personalianya
4. Faktor ekstern lainnya seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan politik.

Selain itu ada beberapa faktor dalam menentukan taxable capacity masyarakat dalam suatu Negara ( Arif S, 1996 : 283), yaitu :

1. Pajak yang dikenakan terhadap masyarakat hendaklah tidak menyebabkan sirnanya kegairahan bekerja para individu dalam masyarakat. Dengan kata lain, pajak hendaklah tidak menimbulkan diincentive kepada individu untuk melakukan kegiatan usaha.

2. Pajak hendaklah tidak menimbulkan political unrest dalam masyarakat sehingga terjadi kegoncangan-kegoncangan sosial. Pajak, yang dikenakan terhadap masyarakat hendaklah tidak merusak popularitas politik pemerintah.
3. Pajak hendaklah cukup untuk dapat membiayai pengeluaran- pengeluaran rutin pemerintah sehingga pemerintah terhindar dari banyak menggali sumber-sumber pembiayaan yang dapat menimbulkan tendensi inflasi (misalnya mencetak uang dan meminjam uang dari sistem perbankan).

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka kegiatan pemerintah di suatu negara dapat dibagi atas 4 golongan, untuk mengatasi pola pembagian pendapatan yang berkembang dalam suatu perekonomian pasar, oleh karena cenderung ke arah tidak adil dan tidak wajar (Due JF, 1973 : 17). Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. Yang bersifat alokasi : kegiatan- kegiatan yang menambah tersedianya fasilitas umum bagi masyarakat secara luas.
2. Yang bersifat efisiensi : kegiatan-kegiatan yang menaikkan hasil total dari sumber-sumber ekonomi tertentu karena penggunaan cara-cara yang lebih efisien.
3. Yang bersifat stabilisasi dan pertumbuhan : kegiatan-kegiatan yang mengurangi ketidakstabilan ekonomi serta pengangguran dan menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi.
4. Yang bersifat pembagian (distribusi) : kegiatan-kegiatan yang menuju pada peningkatan pembagian pola penghasilan potensial menjadi penghasilan riil.

Kegiatan distribusi dan kegiatan stabilisasi pada Umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat sedangkan kegiatan alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat.

Pendapatan pemerintah pusat dipengaruhi oleh besar kecilnya penerimaan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah baik Daerah Tingkat Propinsi maupun Daerah Tingkat Kota Kabupaten perlu lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD) yang salah satunya dari pajak daerah.

Adapun pajak daerah ini pada dasarnya dibagi menjadi dua macam ( Usman B dan Subroto, 1980 : 153), yaitu :

1. Pajak daerah asli yaitu pajak berdasarkan peraturan sejak semula sudah merupakan pajak daerah, baik daerah tingkat Propinsi maupun daerah tingkat Kota/Kabupaten.
2. Pajak negara yang diserahkan kepada daerah tingkat Propinsi maupun daerah tingkat Kota/Kabupaten.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setidaknya ada empat parameter yang menjadi faktor penilaian dan perlu di evaluasi pada tingkat keberhasilannya (Afattah, 2001 ; 4). Keempat faktor tersebut adalah (a) kemampuan keuangan daerah, (b) kemampuan sumber daya manusia, (c) kemampuan sumber daya alam, (d) kemampuan institusi.

## Elastisitas

Apabila faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ataupun penawaran berubah, maka kuantitas permintaan ataupun penawaran berubah pula. Untuk mengetahui besar kecilnya perubahan itu diperlukan suatu ukuran, yakni elastisitas.

Apabila dengan berubahnya faktor penyebab tersebut menyebabkan permintaan ataupun penawaran secara relatif berubah dengan besar maka dikatakan sebagai permintaan atau penawaran yang elastis, sebaliknya apabila permintaan atau penawaran relatif tidak berubah walaupun faktor yang mempengaruhinya telah berubah maka permintaan dan penawaran yang demikian dinamakan tidak elastis (inelastis).

Konsep elastisitas dipergunakan untuk mengukur tingkat perubahan sebagai akibat telah berubahnya faktor-faktor penyebab perubahan. Apabila yang hendak diketahui tingkat perubahan penawaran maka dipergunakan elastisitas penawaran.

### ➤ Elastisitas Permintaan

Sebagaimana dimuka telah dijelaskan kuantitas permintaan akan suatu benda dapat berubah alih karena : harga benda itu berubah, pendapatan konsumen berubah, harga benda-benda lain berubah.

Pengukuran perubahan karena harga suatu benda mengalami perubahan dipakai konsep *price elasticity of demand* atau disingkat dengan *elasticity* saja. Untuk mengukur perubahan sebagai perubahan pendapatan dipergunakan konsep *income elasticity*. Sedangkan *cross elasticity* dipergunakan untuk mengukur perubahan harga benda lain.

### ➤ Definisi

Secara verbal elastisitas permintaan (dalam hal pemakaian istilah permintaan yang dimaksud adalah *price elasticity of demand* dan bukan elastisitas permintaan yang lain seperti *income elasticity of demand* ataupun *cross elasticity of demand*) adalah perbandingan antara persentase perubahan kuantitas permintaan dan persentase perubahan harganya (Kimin, dkk, 1986 : 39).

Menurut hipotesa tentang hubungan antara kuantitas permintaan suatu benda dan harganya, arah perubahan kuantitas sebagai akibat berubahnya harga akan berlawanan (berbeda tanda) dengan arah perubahan harga, oleh karenanya dengan mempergunakan definisi diatas akan selalu didapatkan angka-angka yang negatif. Untuk menghindari keadaan ini maka secara matematis elastisitas permintaan didefinisikan suatu bilangan yang diberi notasi  $\epsilon$  (dibaca eta), dimana :

$$\epsilon = \frac{\% \text{ perubahan kuantitas}}{\% \text{ perubahan harga}}$$

Terdapat definisi yang berbentuk rumus tersebut terdapat suatu masalah yang penting ialah persentase.

Dengan mempergunakan persentase terhadap rata-rata itu perubahan kuantitas dapat dicari persentasenya :

$$\epsilon = \frac{\frac{Q}{(Q_0 + Q_1)} \times 100\%}{\frac{P}{(P_0 + P_1)}}$$

Dimana  $Q$ ,  $Q_1$ ,  $Q_0$  adalah kuantitas permintaan dengan  $Q_0$  sebagai kuantitas mula-mula,  $Q_1$  sebagai kuantitas baru,  $Q$  adalah besarnya perubahan kuantitas ;  $P$ ,  $P_0$ ,  $P_1$  adalah harga dengan  $P_0$  sebagai harga mula-mula,  $P_1$  sebagai harga baru dan  $P$  besarnya perubahan harga.

Elastis dan tidaknya suatu penawaran benda adalah tergantung atas ada dan tidaknya benda substitusi serta vitalnya benda itu terhadap kebutuhan manusia. Apabila tidak terdapat benda substitusinya sedang benda tersebut sangat vital bagi kehidupan manusia maka permintaan terhadap benda itu akan menjadi inelastis, sebaliknya jika terdapat banyak substitusinya terhadap suatu benda maka permintaan akan menjadi elastis.

#### ➤ Income Elasticity

Untuk mengetahui perubahan pendapatan terhadap kuantitas permintaan suatu benda dipergunakan konsep *income elasticity*. Income elasticity dapat dirumuskan sebagai perbandingan antar persentase perubahan kuantitas permintaan dengan persentase perubahan pendapatan. Secara matematik :

$$E_1 = \frac{\% \text{ perubahan } Q_d}{\% \text{ perubahan } Y}$$

Dimana  $E_1$  adalah income elasticity ,  $Q_d$  adalah kuantitas permintaan dan  $Y$  adalah pendapatan

### ➤ Cross Elasticity

Hubungan antara suatu benda dengan benda-benda lainnya dapat bersifat : substitusi, komplementer dan independent. Oleh karena naiknya harga suatu benda dapat menaikkan, menurunkan ataupun tetap terhadap kuantitas permintaan benda lain. Ukuran yang dipilih untuk mengetahui reaksi perubahan kuantitas permintaan suatu benda sebagai akibat berubahnya harga benda lainnya ialah konsep *cross elasticity*.

Rumus ;

$$E_c = \frac{\% \text{ perubahan } Q_d \text{ suatu benda}}{\% \text{ perubahan harga benda lain}}$$

Nilai *cross elasticity* bervariasi antara minus tak terhingga dan plus tak terhingga  $E_c = 0$  atau merupakan bilangan negatif apabila hubungan antara benda-benda itu bersifat komplementer dan  $0 = E_c$  atau merupakan bilangan positif jika hubungan antara benda-benda itu bersifat substitusi.

Ada beberapa faktor tertentu yang mempengaruhi elastisitas permintaan suatu barang.

Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Ada atau tidaknya barang pengganti (barang substitusi). Semakin banyak serta baik suatu barang memiliki barang (atau barang-barang) pengganti, maka semakin elastisitas permintaannya. Sebaliknya, jika suatu barang mempunyai barang (atau barang-barang) pengganti yang semakin sedikit serta jelek, maka semakin elastislah permintaannya.

Jelaslah bahwa jikalau suatu barang dengan mudah digantikan peranannya oleh menggunakan barang penggantinya itu saja dengan cara meninggalkan pemakaian barang yang harganya telah naik itu sehingga permintaan barang yang harganya telah naik itu pun merosot hebat. Sebaliknya, jika barang itu tidak mempunyai pengganti atau mempunyai pengganti tetapi tidak atau kurang begitu baik, maka ketika harganya naik orang itu tidak akan segera berpikir untuk meninggalkan pemakaiannya serta menggantinya dengan memakai barang lain, sebab tentu saja dia tidak dapat dengan seandainya menggantikan pemakaian barang itu karena barang yang harganya naik itu memang tidak memiliki pengganti yang baik.

2. Luas atau sempitnya kemungkinan penggunaan barang yang bersangkutan. Apabila suatu barang tertentu dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam (yakni : mempunyai banyak kemungkinan penggunaannya) maka permintaannya akan lebih elastis daripada barang yang kemungkinan penggunaannya lebih sedikit. Sebabnya karena semakin luas kemungkinan penggunaannya maka semakin besar pula kemungkinan perubahan jumlah yang diminta jika harganya berubah.
3. Pentingnya bagi kehidupan. Jika suatu barang memiliki arti yang lebih penting bagi kehidupan manusia, maka akan semakin inelastislah permintaannya, dan sebaliknya semakin kurang penting suatu barang bagi kehidupan maka akan semakin elastislah permintaan terhadapnya.

4. Sifat tahan lama suatu barang. Semakin tahan lama suatu barang maka semakin elastislah permintaan terhadapnya dan demikian pula sebaliknya semakin tidak tahan lama suatu barang maka semakin inelastis pula permintaan terhadapnya.
5. Harga barang dibandingkan dengan pendapatan konsumen. Semakin mahal harga suatu barang semakin elastis permintaannya (Rosyidi ; 1996 ; 254-267).

Adapun tolak ukur yang dipakai untuk hal ini adalah sebagai berikut :

Jika koefisien elastisitas itu menunjukkan angka :

- a. Tak terhingga ( $\infty$ ) maka elastisitas permintaannya adalah elastis sempurna (*perfect elastic*).
- b. Lebih besar dari satu ( $> 1$ ) maka elastisitas permintaannya adalah elastis (*elastic / relatively elastic*).
- c. Sama dengan satu ( $= 1$ ) maka elastisitas permintaannya adalah unit ( $=1$ ) atau biasa disebut *unitary elastic / unit elastic*.
- d. Kurang dari satu ( $< 1$ ) maka elastisitas permintaannya adalah inelastis (*inelastic / relatively inelastic*).
- e. Sama dengan nol ( $= 0$ ) maka elastisitas permintaannya adalah inelastis sempurna (*perfect inelastic*).

Ke lima kriteria untuk koefisien elastisitas permintaan tersebut diatas dapat diterangkan sebagai berikut (Rosyidi ; 1996 ; 269-269) :

- a. Koefisien elastisitas permintaan yang besarnya tak terhingga adalah untuk barang-barang yang mana jumlahnya yang diminta berubah-ubah dengan tidak adanya

perubahan harga atau dengan perkataan lain pada tingkat harga yang sama dapat diminta jumlah barang yang berbeda-beda, artinya bahwa sekalipun terdapat perubahan harga tetapi jumlah barang yang diminta dapat juga berubah-ubah.

- b. Koefisien elastisitas permintaan yang lebih besar dari satu adalah untuk barang-barang yang sedikit saja harganya berubah sudah cukup untuk menyebabkan terjadinya perubahan yang berarti pada jumlah barang yang diminta atau dengan kata lain jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh perubahan harga.
- c. Koefisien elastisitas permintaan yang sama dengan satu, yaitu elastisitas satu atau unit elasticity, adalah untuk barang-barang yang perubahan jumlah yang diminta sebanding (proporsional) dengan perubahan harga.
- d. Koefisien elastisitas permintaan yang kurang dari satu, adalah untuk barang-barang yang perubahan harganya tidak seberapa banyak menyebabkan perubahan pada jumlah yang diminta atau dengan kata lain perubahan jumlah yang diminta sedikit saja terpengaruh oleh perubahan harganya.
- e. Koefisien elastisitas permintaan yang sama dengan nol, yaitu permintaan yang inelastis sempurna adalah untuk barang-barang yang perubahan harganya tidak berpengaruh sama sekali terhadap jumlah yang diminta ; atau dengan kata lain, jumlah yang tertentu akan tetap diminta orang lain sekalipun harganya berubah-ubah.

## 1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian Yuliati (1999) mengenai analisis kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi otonomi daerah di Kabupaten Malang menyatakan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama kurun waktu lima tahun (1995-1999) sebesar 15%, sedangkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 29%. Ini menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Malang terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi. Jika dilihat dari kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendanai belanja rutin daerah maka rata-rata selama lima tahun sebesar 32% dan jika ditambah dengan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) sebesar 62% yang berarti pembiayaan belanja rutin masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat. Kabupaten Malang memiliki kapasitas fiskal yang relatif baik dibandingkan dengan satandar fiskal rata-rata Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Penelitian Hasan (2000) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pajak hiburan di Kota Palembang mengemukakan bahwa jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi, jumlah tempat hiburan dan keringan pajak secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan, sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Zahari (2001) tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Jambi mengemukakan bahwa

pendapatan per kapita, keragaman sumber penerimaan pajak dan retribusi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian Silva Petrus (2001) mengenai analisa anggaran pendapatan daerah Kabupaten Sikka tahun anggaran 2001 menyatakan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sikka yang diukur melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 4,13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka dalam rangka otonomi di tinjau dari kemampuan keuangan daerah belum mampu untuk lepas dari pemerintah pusat.

Penelitian Bamim (2002), tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Propinsi Sumatera Selatan mengemukakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, jumlah kendaraan bermotor, secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Duman (2004 : 107) tentang Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pembiayaan Fungsi Baku Pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas mengemukakan bahwa walaupun pendapatan asli daerah masih kecil dalam menunjang pembiayaan fungsi-fungsi baku yang berarti perubahan dalam nilai variable pendapatan asli daerah mengakibatkan perubahan nilai variable BRNP.

## **1.7 Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah tingkat elastisitas pajak daerah Kota Palembang berpengaruh positif dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

## 1.8 Metodologi Penelitian

### 1.8.1 Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini untuk membahas elastisitas, efesiensi dan efektivitas pajak daerah ditinjau dari beberapa pembahasan utama yaitu Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dan PDRB Kota Palembang, penulis mengambil Palembang sebagai objek penelitian.

### 1.8.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui buku-buku literature, Badan Pusat Statistik Kota Palembang, Dinas Pendapatan Daerah dan BAPPEDA Kota Palembang.

### 1.8.3 Teknis Analisis

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisa Deskriptif Kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan Pendapatan Asli Daerah dan PDRB Kota Palembang serta menggunakan teknik analisa Deskriptif Kuantitatif untuk mengetahui besarnya elastisitas pajak dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$e = \frac{\text{Persentase Perubahan PAD Kota Palembang}}{\text{Persentase Perubahan PDRB Kota Palembang}}$$

$$e = \frac{\Delta Tr}{\Delta Y} \times \frac{Y}{Tr}$$

Dimana :

$e$  = Elastisitas pajak

$Tr$  = Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

$Y$  = PDRB Kota Palembang pada harga berlaku

$\Delta$  = Perubahan

Dengan mengetahui besarnya elastisitas pajak, dapat diketahui kepekaan pajak daerah terhadap PDRB. Jika ( $e > 1$ ), berarti setiap perubahan dalam PDRB sebesar satu persen akan mengakibatkan perubahan dalam penerimaan Pajak Daerah lebih dari satu persen. Hal ini dapat diartikan bahwa pajak di daerah tersebut elastis, atau posisi pajaknya kuat, sebaliknya ( $e < 1$ ), berarti bahwa pajak di daerah tersebut tidak elastis atau posisi pajaknya lemah. (Uppal, 1985 : 79)

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini maka digunakan suatu fungsi regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$\text{Ln}Y = \alpha + \beta \text{Ln}X + e$$

$\text{Ln}Y$  = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

$\alpha$  = Konstansta

$\beta$  = Elastisitas

$\text{Ln}X$  = PDRB (harga berlaku)

$e$  = Variabel Pengganggu

Pengujian model ini menggunakan :

1. Uji T (t-test)

Uji ini digunakan untuk memperlihatkan keandalan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat, sehingga dapat diketahui validitas persamaan regresi dalam memprediksi kondisi riil, rumusnya adalah :

$$t_n = \frac{b_i}{s_{b_i}}$$

dimana :

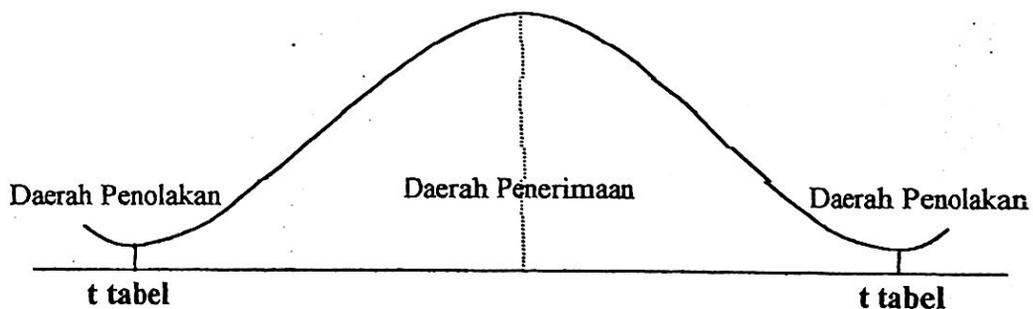
$t_n$  = nilai t hitung

$b_i$  = parameter

$s_{b_i}$  = standar kesalahan parameter  $b_i$ , rumusnya adalah :

$$s_{b_i} = \sqrt{\frac{se^2}{\sum x_{12}}}$$

t-hitung ( $t_n$ ) ini kemudian dibandingkan dengan t-tabel. Apabila t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel, maka  $h_0$  diterima. Apabila t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel, maka  $h_0$  ditolak dan  $h_a$  diterima, dengan derajat kepercayaan 95% daerah penerimaan hipotesis.

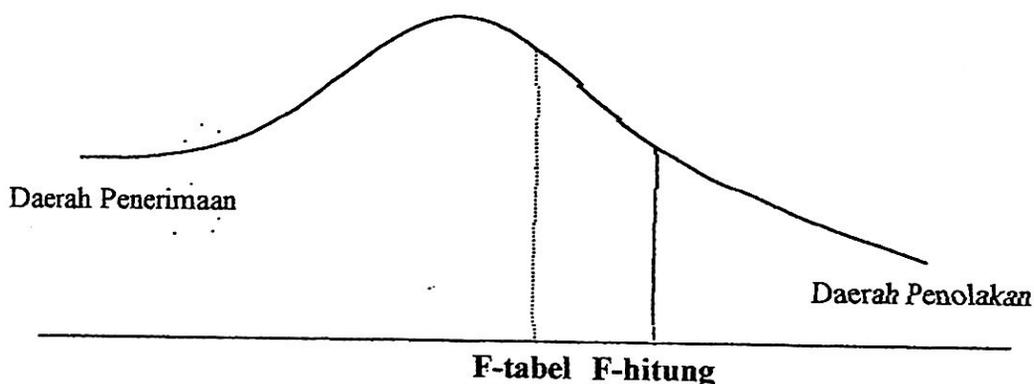


## 2. Uji F (f-test)

Uji ini menggunakan rumus :

$$F_n = \frac{\text{Rata-rata Kuadrat Regresi}}{\text{Rata-rata Kuadrat Kesalahan Pengganggu}}$$

F hitung ( $F_n$ ) ini kemudian dibandingkan dengan F tabel dan derajat kepercayaan yang digunakan sebesar 95%. Apabila nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka  $H_0$  diterima. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka  $H_a$  diterima. Jika  $H_0$  diterima berarti  $H_a$  ditolak, sebaliknya jika  $H_0$  ditolak berarti  $H_a$  diterima.



Untuk menilai sasaran utama terhadap pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan penerimaan daerah dengan pengeluaran rutin. Analisis ini menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan / penerimaan daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

#### A. Tingkat Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perbandingan antara biaya pemungutan dan realisasi pajak daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat dilakukan terhadap sistem pengelolaan

keuangan pemerintah daerah, dengan criteria penilaian berdasarkan penilaian dan kinerja keuangan seperti yang terdapat dalam Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1997 yang disusun dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1  
Ukuran Tingkat Efisiensi

Tingkat Efisiensi	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Dibawah dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : (Duman, 2004 ; 39 -40)

Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

### B. Tingkat Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Hasil Pemungutan}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu

dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya, (The Liang Gie, 1997 : 108).

Selanjutnya efektifitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektifitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai (Richard M. Steers dalam Magdalena Yamin, 1985 : 5) . Apabila konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak utama penerimaan PHR, maka efektifitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan PHR berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Nilai efektivitas diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan yang disusun dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

Ukuran Tingkat Efektivitas

<b>Tingkat Efektivitas</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : (Duman, 2004 ; 39 -40)

## 1.9 Batasan Variabel

Untuk memudahkan didalam memahami dan menganalisis penulisan skripsi ini, juga agar tidak terjadi kesalahan dalam mengintreprestasikannya, maka penulis memiliki batasan-batasan sebagai berikut, yaitu:

1. Pajak daerah, ialah iuran wajib orang perorang kepada badan pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat dipaksakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendapatan Asli Daerah, adalah penerimaan asli yang berasal dari daerah tersebut yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan hasil usaha daerah yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (UU No. 33,2004,98)
3. Elastisitas, adalah tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan pajak jika terjadi perubahan pada jumlah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
4. Efisiensi, adalah mengukur bagian dari hasil pajak yang didapat terhadap biaya pemungutan dari pajak yang bersangkutan.
5. Efektivitas, adalah mengukur hubungan antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Indikator efektivitas adalah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua wajib pajak membayar semua pajak yang terhutang.
6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), adalah jumlah produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu unit-unit produksi dalam periode tertentu selama satu tahun.

7. Harga berlaku adalah nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada tahun yang bersangkutan yang berarti termasuk kenaikan harga ikut dihitung.
8. Harga konstan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar.
9. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Otonomi daerah, 2001 ; 43)

## DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, Agustinus, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, Jakarta : PT Gramedia, 2001.
- B. Hirawan, Susiyati. *Peraturan per Undang-Undangan Pajak dan Retribusi Daerah dilihat dari Manajemen keuangan*, disampaikan dalam rangka seminar sehari Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta, 1990.
- B. Usman dan K. Subroto, *Pajak-Pajak Daerah*, Yayasan Bina Pajak, Jakarta, 1980, Hal.153.
- BPS, *Palembang Dalam Angka*, 2004.
- Dedy. *Upaya intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli daerah*, Jawa Barat, 2000.
- Devas, Nick. *Pembiayaan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1989.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, *Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah*, 2004
- Dr. Sritua Arif, *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Lanjutan*, PT Raja Grafinda Utama Persada, Jakarta, 1996, Hal. 283.
- John F. Due, *Keuangan Negara*, Terjemahan oleh Drs. Iskandarsyah, BPFE-UI, Jakarta, 1973, Hal. 17.
- Kimin, M, Basir dkk, *Pengantar Teori Ekonomi*, Penerbit Fakultas Ekonomi UNSRI, Palembang, 1986, Hal. 39.
- Mamesah, Dj.Des. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Mangkusubroto , Guritno, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta :BPFE. UGM Press, 1998.

- Radius Prawiro, *Empat Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Sistem Perpajakan*, Dalam *EKI*, 1988, Hal. 311.
- Riwu, KJ. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Sudargo R, "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*" NE Eresco, Bandung, 1964.
- Sutrisno PH, *Ekonomi Publik I*, Karunika Jakarta UT, 1986
- Suparmoko, M. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2003.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Undang-undang Otonomi Daerah. Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah* Serta Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta : Fokusmedia, 2004.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lampiran Suparmoko, M Dalam Buku *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Andi Yogyakarta, 2003.
- Wihana, KJ. *Model Analisis Potensi Keuangan Daerah*, kerjasama Dirjen PUOD DEP DAGRI dengan pusat penelitian dan Pengkajian Ekonomi serta Bisnis , UGM, Yogyakarta, 1996.
- The Liang Gie, *Ensiklopedia Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1997.